



PERUBAHAN RENJA BAPPEDA

Perubahan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

2025





BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tersebut merupakan landasan penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2025 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.
- c. bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- b. pedoman dalam penyusunan rancangan KUPA serta Prioritas dan PPAS Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah :

- a. sistematika;
- b. penyusunan perubahan RKPD.

BAB II PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 juni 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 20 juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini memberikan gambaran tentang Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2025 yang memuat Perubahan target capaian, kinerja, dan Pagu yang akan di capai pada Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhir kata, dokumen Perubahan Renja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif guna mendukung terwujudnya "Peningkatan Daya Saing Sdm Berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat".

Tembilahan, Juni 2025
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERJALAN.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	II-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah dalam periode lima tahunan maupun jangka pendek dalam periode tahunan. Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berfungsi untuk menterjemahkan rencana strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada arahan kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun Pelaksanaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda. Kemudian, Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu sub kegiatan baik Penambahan dan Pengurangan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjaga Konsistensi Capaian Kinerja Perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 agar terjadi kesinambungan program, kegiatan dan kegiatan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan, kemudian dikaitkan dengan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025. Pada Evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan sebanyak 4 program dengan anggaran senilai Rp. 14.041.424.434 (Empat Belas Milyar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). dari anggaran tersebut sampai dengan triwulan II Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah merealisasi kan anggaran sebesar Rp. 3.872.126.338 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 27,58%, dengan kinerja 30,03%, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 9.520.539.608 (Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 3.501.532.991 (Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 36,78 % dengan kinerja 47,10%, Kemudian Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 1.760.768.826 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 195.810.200 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 11,12 % dengan capaian kinerja 54,11%, kemudian Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggran Rp. 1.588.618.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 124.866.397 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 7,86 % dengan realisasi kinerja 42,70% dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp. 1.171.498.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 49.916.750 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 4,26 % dengan kinerja 0 %, secara rinci tersaji di table berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024-2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			14.041.424.434									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.041.424.434									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN			12.869.926.434									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	9.520.539.608	25,47	1.623.149.659	21,64	1.878.383.332	47,10	3.501.532.991	1,60	41,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100	42.322.843	53,3	447.200	10	1.304.000	63,33	1.751.200	1,53	30,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	20.478.801	2	447.200	1	326.000	3	773.200	0,47	32,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	21.844.042	2	-	0	978.000	2	978.000	0,56	26,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	6.124.465.210	60,20	1.213.370.514	10,20	1.332.456.787	17,60	2.545.827.301	0,78	39,84	BADAN PERENCANAAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
													PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	6.103.764.710	40	1.211.272.514	40	1.330.460.287	40	2.541.732.801	0,54	39,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.700.500	1	2.098.000	0	1.996.500	1	4.094.500	0,67	41,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	150.100.000	0	-	0	-	0	-	0,36	14,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	150.100.000	0	-	0	-	0	-	0,08	14,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	2.211.958.435	23,07	266.946.575	57,59	393.855.363	20,17	660.801.938	0,70	50,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	14.978.700	2	2.493.600	2	3.537.300	1	6.030.900	0,50	49,56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	193.215.735	1	7.639.575	2	48.273.900	3	55.913.475	0,44	62,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	107.050.000	4	15.669.000	4	17.000.700	2	32.669.700	0,50	47,12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	26.500.000	3	2.600.000	3	4.100.000	2	6.700.000	0,56	43,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	26.520.000	20	5.210.000	20	7.815.000	10	13.025.000	0,32	55,99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.756.684.000	3	233.334.400	3	313.128.463	6	546.462.863	0,62	49,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	87.010.000	0	-	0	-	0	-	0,13	33,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	2	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	614.373.120	21,67	130.889.276	61,67	126.481.907	20,83	257.371.183	0,61	67,99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	1	900.000	1	1.500.000	1	2.400.000	0,67	52,39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	183.940.000	3	36.924.521	3	38.897.461	6	75.821.982	0,50	52,26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	425.433.120	3	93.064.755	3	86.084.446	2	179.149.201	0,47	90,47	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100	377.320.000	20,00	11.496.094	11,98	24.285.275	31,98	35.781.369	0,92	31,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	89.400.000	13	11.071.094	7	19.039.275	20	30.110.369	0,51	42,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	20,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53	285.920.000	15	425.000	10	5.246.000	25	5.671.000	0,50	23,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	47,10	36,78			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Prediket Kinerja :	57	5			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuh	100	1.760.768.826	19,78	44.253.600	34,33	151.556.600	54,11	195.810.200	1,04	27,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada	2	1.417.001.926	0	24.705.000	28	90.008.000	28	114.713.000	15,00	25,53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.000 1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD	5	367.020.000	0	2.610.000	2	5.696.500	2	8.306.500	0,60	16,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
		Maka Rancangan Teknokratik)											
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	23.323.000	1	2.600.000	1	8.745.000	2	11.345.000	1,00	22,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			0	-		-	0				
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	276.350.000	2	14.695.000	0	30.265.000	2	44.960.000	1,00	26,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	750.308.926	0	4.800.000	0	45.301.500	0	50.101.500	0,25	33,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		(RPJPD/RPJMD/RKPD)											
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	100	153.774.900	25	19.548.600	25	19.548.600	13	39.097.200	1,13	58,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3	153.774.900	3	19.548.600	3	19.548.600	2	39.097.200	0,56	58,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat	100 Pers en 100	189.992.000	0	-	50	42.000.000	50	42.000.000	1,50	24,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
		Tinggi (Interval 75 % - 100 %)											
5.01.02.2.03.000 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	21.450.000	0	-	0	-	0	-	0,33	19,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.000 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	168.542.000	0	-	1	42.000.000	1	42.000.000	0,67	27,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	30,33	22,24			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Prediket Kinerja :	R	SR			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD,RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	100	1.588.618.000	0	58.638.498	42,70 16	66.227.899	42,70	124.866.397	1,55	27,99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	100	533.677.200	0	11.729.500	74,12	18.729.400	74,12	30.458.900	1,25	20,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.01.03.2.01.000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	105.109.600	0	3.272.950	2	4.936.350	2	8.209.300	0,44	20,68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.000 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	75.795.100	0	-	0	-	0	-	0,33	20,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	77.696.400	0	-	0	-	0	-	0,33	18,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	103.032.500	0	3.160.850	2	4.743.150	2	7.904.000	0,44	17,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38	67.796.000	0	2.484.000	24	3.212.000	24	5.696.000	0,42	18,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	104.247.600	0	2.811.700	1	5.837.900	1	8.649.600	0,67	24,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	546.281.200	0	8.629.000	0	7.573.000	0	16.202.000	1,00	25,91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	262.647.200	0	1.020.000	0	3.373.000	0	4.393.000	0,33	30,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.000 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	283.634.000	0	7.609.000	0	4.200.000	0	11.809.000	0,33	21,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	508.659.600	0	38.279.998	53,98	39.925.499	53,98	78.205.497	2,41	41,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.000 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	32	325.198.900	0	14.270.000	17	22.128.800	17	36.398.800	0,79	30,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	31	183.460.700	0	24.009.998	17	17.796.699	17	41.806.697	0,82	60,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	42,70	7,86			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Prediket Kinerja :	T	SR			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.171.498.000									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	1.171.498.000	0	37.172.000	0	12.744.750	0	49.916.750	0,85	27,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	100	200.000.000	0	10.210.000	0	2.695.500	0	12.905.500	0,50	21,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				-		-					
5.05.02.2.01.001 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	-		-		-	0	-	0,33	19,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.01.001 3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1	200.000.000	0	10.210.000	0	2.695.500	0	12.905.500	0,33	23,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	500.000.000	0	7.960.000	0	1.281.000	0	9.241.000	0,00	1,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03.000 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					I		II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(3)		(4)	(7)		(8)		(9)		(12)		(14=13/5 x100%)		(15)
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	200.000.000	0	7.960.000	0	1.281.000	0	9.241.000	0,00	2,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	471.498.000	0	19.002.000	0	8.768.250	0	27.770.250	1,00	32,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	300.000.000	0	17.520.000	0	8.086.250	0	25.606.250	0,33	35,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	93.118.000	0	1.012.000	0	682.000	0	1.694.000	0,33	29,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	78.380.000	0	470.000	0	-	0	470.000	0,33	31,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja (%) :	0	4,26			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Prediket Kinerja :	SR	SR			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program(%) :	30,03	17,79			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Prediket Kinerja :	R	SR			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025. Untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 serta Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
2. Keserasian dan kesinambungan pembangunan baik dari sisi perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Ketersediaan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun harus menjawab dan merespon isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan prioritas nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
6. Secara rinci rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.1. berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							14.041.424.434,00	12.546.731.640,67	10.239.109.861,99	-3.802.314.572,01							9.707.468.404,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.041.424.434,00	12.546.731.640,67	10.239.109.861,99	-3.802.314.572,01							9.707.468.404,00	
	5.01	PERENCANAAN							12.869.926.434,00	11.458.241.740,67	9.607.189.561,99	-3.262.736.872,01							8.225.404.754,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	9.520.539.608,00	9.963.834.023,27	8.657.618.801,99	-5.972.279.010,00							3.548.260.598,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	42.322.843,00	22.012.843,00	9.479.663,50	-32.843.179,50			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		78.717.906,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	20.478.801,00	10.306.801,00	6.461.663,50	-14.017.137,50	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			46.437.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	21.844.042,00	11.706.042,00	3.018.000,00	-18.826.042,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			32.280.106,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	6.124.465.210,00	6.114.267.565,59	6.345.381.514,13	220.916.304,13			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		673.864.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	6.103.764.710,00	6.103.764.710,59	6.337.663.014,13	233.898.304,13	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			578.867.301,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.700.500,00	10.502.855,00	7.718.500,00	-12.982.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			94.996.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	150.100.000,00	118.260.000,00	0,00	-150.100.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		156.561.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	18 Orang	150.100.000,00	118.260.000,00	0,00	-150.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			156.561.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	2.211.958.435,00	2.664.013.694,68	1.344.698.704,36	-867.259.730,64			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.876.797.841,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.978.700,00	12.509.700,00	12.029.700,00	-2.949.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			21.599.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	193.215.735,00	543.549.944,68	226.787.704,36	33.571.969,36	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			360.788.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	107.050.000,00	116.712.850,00	78.670.900,00	-28.379.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			128.883.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.500.000,00	26.500.000,00	17.225.000,00	-9.275.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			38.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	26.520.000,00	26.520.000,00	31.260.000,00	4.740.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.756.684.000,00	1.894.411.200,00	935.665.400,00	-821.018.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			1.190.177.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	87.010.000,00	43.810.000,00	43.060.000,00	-43.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			106.600.041,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan				2 Persen	2 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		69.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			69.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				100 Persen	100 Persen	614.373.120,00	598.349.920,00	581.968.920,00	-32.404.200,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		364.184.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.940.000,00	183.940.000,00	206.159.000,00	22.219.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			208.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	425.433.120,00	409.409.920,00	370.809.920,00	-54.623.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			149.864.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	377.320.000,00	446.930.000,00	376.090.000,00	-1.230.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		328.354.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	43 Unit	89.400.000,00	128.900.000,00	93.100.000,00	3.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			139.064.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	870.000,00	76.300.000,00	74.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	53 Unit	285.920.000,00	317.160.000,00	206.690.000,00	-79.230.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			168.290.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuh				100 100 % Persen	100 100 % Persen	1.760.768.826,00	883.364.108,00	575.812.210,00	-119.978.776,00							1.640.790.050,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada				2 Dokumen	2 Dokumen	1.417.001.926,00	682.320.034,00	416.350.210,00	-1.000.651.716,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir		1.331.451.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>				5 Dokumen	1 Dokumen	367.020.000,00	218.674.993,00	173.770.000,00	-193.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			483.929.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	2 Berita Acara	23.323.000,00	30.400.000,00	11.345.000,00	-11.978.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			32.539.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	2 Berita Acara	276.350.000,00	211.160.000,00	44.960.000,00	-231.390.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			153.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	750.308.926,00	222.085.041,00	186.275.210,00	-564.033.716,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			661.597.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar</i>				100 Persen	100 Persen	153.774.900,00	130.402.900,00	114.462.000,00	-39.312.900,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		105.716.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				3 Orang	54 Orang	153.774.900,00	130.402.900,00	114.462.000,00	-39.312.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			105.716.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)</i>				100 Persen	100 Persen	189.992.000,00	70.641.174,00	45.000.000,00	-144.992.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		203.622.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				2 Laporan	2 Laporan	21.450.000,00	11.250.000,00	0,00	-21.450.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			69.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	168.542.000,00	59.391.174,00	45.000.000,00	-123.542.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			133.762.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD,RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)				100 %	100 %	1.588.618.000,00	611.043.609,40	373.758.550,00	1.447.736.106,00							3.036.354.106,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia				100 Persen	100 Persen	533.677.200,00	146.126.910,00	81.506.300,00	-452.170.900,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		1.108.166.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	105.109.600,00	24.657.050,00	17.157.050,00	-87.952.550,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			173.816.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	75.795.100,00	0,00	0,00	-75.795.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			144.685.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	77.696.400,00	0,00	0,00	-77.696.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			167.473.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	103.032.500,00	21.974.300,00	16.374.300,00	-86.658.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			168.831.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				38 Laporan	38 Laporan	67.796.000,00	46.619.860,00	14.189.250,00	-53.606.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			216.066.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	104.247.600,00	52.875.700,00	33.785.700,00	-70.461.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			237.293.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 Persen	100 Persen	546.281.200,00	239.937.600,00	141.753.600,00	-404.527.600,00			-	- - -	10 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		1.120.010.506,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	262.647.200,00	117.047.600,00	115.017.600,00	-147.629.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			578.867.301,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	283.634.000,00	122.890.000,00	26.736.000,00	-256.898.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			541.143.205,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan				100 Persen	100 Persen	508.659.600,00	224.979.099,40	150.498.650,00	-358.160.950,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	6 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		808.177.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				32 Laporan	7 Laporan	325.198.900,00	95.626.900,00	60.095.150,00	-265.103.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			517.010.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				31 Laporan	5 Laporan	183.460.700,00	129.352.199,40	90.403.500,00	-93.057.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			291.166.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.171.498.000,00	1.088.489.900,00	631.920.300,00	-539.577.700,00							1.482.063.650,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				100 %	100 %	1.171.498.000,00	1.088.489.900,00	631.920.300,00	310.565.650,00							1.482.063.650,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	163.994.000,00	-36.006.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		332.452.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			149.607.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000,00	200.000.000,00	163.994.000,00	-36.006.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			182.845.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun				-	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</i>				100 Persen	100 Persen	471.498.000,00	388.489.900,00	267.926.300,00	-203.571.700,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		549.611.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	232.958.250,00	-67.041.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			177.648.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	1 Laporan	93.118.000,00	68.289.900,00	20.394.550,00	-72.723.450,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			166.117.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				3 Laporan	3 Laporan	78.380.000,00	20.200.000,00	14.573.500,00	-63.806.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			205.844.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	J U M L A H								14.041.424.434,00	12.546.731.640,67	10.239.109.861,99	-3.802.314.572,01						9.707.468.404,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
2. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025;

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga sekaligus menjadi ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun anggaran 2025.

Tembilahan, Juli 2025
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002